

Politik Tubuh Perempuan di Bali, Kajian Literatur atas Relasi Kuasa, Identitas Budaya, dan Ruang Gerak Sosial

Ni Made Putri Lestari¹, Tedi Erviantono², Piers Andreas Noak³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received July, 2025

Revised July, 2025

Accepted July, 2025

Available online July, 2025

made.putri023@student.unud.ac.id,

erviantono2@unud.ac.id,

piersandreasnoak@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Politik tubuh perempuan merupakan isu sentral dalam kajian gender dan budaya, yang merefleksikan bagaimana kekuasaan sosial, adat, dan agama mengatur, mengawasi, dan memberi makna terhadap tubuh perempuan. Dalam konteks Bali, tubuh perempuan tidak sekadar entitas biologis, melainkan konstruksi budaya yang sarat dengan simbolisme, kontrol moral, dan beban sosial. Melalui studi literatur ini, ditelaah bagaimana tubuh perempuan Bali diposisikan dalam praktik adat, ritual keagamaan, hingga dinamika sosial sehari-hari, serta bagaimana relasi kuasa bekerja dalam membentuk batas-batas terhadap otonomi tubuh perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku, dan skripsi yang membahas tema serupa. Hasil kajian menunjukkan bahwa tubuh perempuan Bali menjadi medan tafsir antara ketaatan terhadap tradisi dan upaya untuk merebut agensi. Meski struktur patriarkal masih dominan, banyak perempuan Bali mulai menegosiasikan peran dan tubuh mereka melalui jalur

pendidikan, seni, dan partisipasi sosial. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interseksional dan emansipatoris dalam memahami politik tubuh dalam masyarakat adat.

Kata Kunci : Politik Tubuh, Perempuan Bali, Patriarki, Budaya, Agensi, Studi Literatur

ABSTRACT

The politics of the female body is a central issue in gender and cultural studies, reflecting how social, customary, and religious power regulate, control, and give meaning to women's bodies. In the Balinese context, the female body is not simply a biological entity, but a cultural construct laden with symbolism, moral control, and social burdens. This literature review examines how Balinese women's bodies are positioned within customary practices, religious rituals, and everyday social dynamics, as well as how power relations operate to shape the boundaries of women's bodily autonomy. This research uses a qualitative approach with a literature review method of various scientific journals, books, and theses discussing similar themes. The results of the study indicate that Balinese women's bodies become a field of interpretation between adherence to tradition and efforts to seize agency. Although patriarchal structures remain dominant, many Balinese women are beginning to negotiate their roles and bodies through education, art, and social participation. This study underscores the importance of intersectional and emancipatory approaches in understanding body politics in indigenous communities.

Keywords: Body Politics, Balinese Women, Patriarchy, Culture, Agency, Literary Studies

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Tubuh perempuan, dalam sejarah sosial dan budaya, selalu menjadi arena pertarungan makna dan kontrol kekuasaan. Tidak pernah benar-benar menjadi milik perempuan itu sendiri, tubuh mereka senantiasa dimaknai, diatur, dan dilabeli melalui lensa budaya, agama, moralitas sosial, dan kebijakan negara. Dalam masyarakat Bali, relasi antara tubuh perempuan dan struktur sosial begitu kompleks karena dibentuk oleh tatanan adat yang kuat, struktur keagamaan yang sakral, serta perkembangan sosial modern yang terus berubah. Tubuh perempuan Bali tidak hanya menjalani kehidupan biologis, tetapi juga dihidupkan sebagai simbol spiritual, kesuburan, kehormatan keluarga, bahkan alat pelestarian tradisi. Ia menjadi objek sekaligus subjek dari proses sosial yang menjadikannya simbol budaya. Perempuan diharapkan menjalani serangkaian ritual sejak masa pubertas hingga kematian yang kesemuanya melibatkan tubuh secara aktif seperti *menek kelih* (ritus menstruasi pertama), *metatah* (potong gigi sebagai penanda kedewasaan), dan larangan-larangan berbasis tabu seperti tidak boleh masuk pura saat menstruasi atau saat hamil muda. Dalam kajian budaya dan gender, ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dikelola melalui konstruksi sosial yang sangat spesifik dan penuh muatan ideologis.

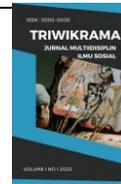
Menurut Nensilanti, N., Ridwan, R., & Ramadani, A. S. (2025), tubuh bukan hanya entitas biologis, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh jaringan kekuasaan melalui berbagai praktik seperti disiplin, normalisasi, dan pengawasan. Konsep *biopower* dan *disciplinary power* Sabri, M. (2023) menjelaskan bagaimana tubuh perempuan didisiplinkan oleh institusi sosial seperti keluarga, adat, dan agama agar sesuai dengan norma tertentu. Dalam masyarakat Bali, kekuasaan adat memainkan peran besar dalam mengarahkan bagaimana tubuh perempuan harus tampil, berperilaku, dan menjalani fungsi sosialnya. Tidak hanya dalam ruang domestik, kekuasaan ini merambah hingga ke ranah publik dan ritual. Tubuh perempuan diharapkan untuk selalu tampil dalam format ‘anggun’, mengenakan pakaian adat yang sesuai, menjaga suara dan gestur tubuh, serta menjaga ‘kesucian’ spiritual agar tetap dapat menjalani fungsi religius dalam masyarakat. Wardhani, N (2025), dalam konsep *gender performativity*, mengkritisi bahwa jenis kelamin biologis seringkali dipakai untuk melegitimasi praktik budaya dan sosial yang membakukan peran gender tertentu. Bagi Butler, gender bukanlah identitas bawaan, melainkan hasil dari tindakan sosial yang dilakukan berulang-ulang sehingga dianggap wajar. Dalam konteks Bali, tubuh perempuan dianggap ‘alami’ bila tunduk pada norma adat, padahal itu adalah hasil dari tekanan sosial yang terus direproduksi.

Selain konstruksi adat dan keagamaan, perkembangan pariwisata juga memberikan pengaruh signifikan terhadap politik tubuh perempuan Bali. Tubuh perempuan kerap menjadi objek promosi budaya Bali melalui representasi tari tradisional, iklan-iklan wisata, atau tampilan dalam pagelaran budaya yang dikurasi untuk wisatawan mancanegara. Citra “perempuan Bali” ditampilkan sebagai lembut, eksotis, spiritual, dan setia pada tradisi. Mulyana, A. (2022) menunjukkan bagaimana perempuan Bali secara tidak langsung mengalami *komodifikasi kultural*, di mana tubuh dan ekspresi kultural mereka menjadi aset ekonomi pariwisata yang dikendalikan oleh sistem kapitalis. Ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan tidak hanya dikontrol oleh budaya lokal, tetapi juga oleh logika global yang menuntut estetika, performativitas, dan narasi eksotis.

Lebih lanjut dalam perspektif interseksional yang dikembangkan oleh Artawan, G. (2023), tubuh perempuan Bali tidak bisa dilepaskan dari posisi sosial lainnya, seperti kelas ekonomi, kasta, pendidikan, dan usia. Perempuan dari kelompok adat rendah atau pendidikan terbatas memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap eksploitasi tubuh baik dalam ranah domestik, pekerja seni, hingga pekerja pariwisata. Sementara perempuan dari latar kelas menengah yang lebih terdidik

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



mulai memproduksi bentuk-bentuk resistensi, misalnya melalui seni pertunjukan alternatif, gerakan komunitas perempuan, atau edukasi gender berbasis komunitas. Ini menunjukkan bahwa politik tubuh perempuan di Bali bukanlah sesuatu yang tunggal atau statis, melainkan terus dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat kontemporer Bali, tubuh perempuan juga berhadapan dengan standar moral modern yang ambigu. Di satu sisi, perempuan dituntut menjadi 'emansipatif' dan berpendidikan tinggi, namun di sisi lain tetap harus menjalankan peran tradisional sebagai istri, ibu rumah tangga, dan penjaga tradisi keluarga. Kajian terbaru dari Huriani, Y. (2021) menunjukkan bahwa banyak perempuan muda Bali mengalami ketegangan psikologis dalam menjalankan peran-peran ganda tersebut, karena tuntutan budaya tidak sepenuhnya memberi ruang bagi ekspresi tubuh yang otonom. Dalam hal ini, teori *posthuman feminism* dari Badruddin, S., (2024) sangat relevan, di mana tubuh perempuan dilihat tidak hanya sebagai entitas biologis atau sosial, tetapi juga sebagai hasil interaksi kompleks antara manusia, teknologi, budaya, dan sistem global. Perspektif ini membuka pemahaman baru bahwa tubuh perempuan Bali bukan hanya dikendalikan oleh adat dan agama, tetapi juga oleh struktur digital, media sosial, dan nilai-nilai modern yang terus bergerak.

Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut, kajian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana tubuh perempuan Bali dikonstruksikan, dikendalikan, dan direpresentasikan dalam berbagai ranah kehidupan baik dalam adat, agama, ekonomi budaya, maupun media modern. Melalui pendekatan studi literatur, penulis menelaah kontribusi teori-teori kritis dan hasil penelitian terkini untuk menyusun pemetaan atas dinamika politik tubuh perempuan Bali. Fokusnya tidak hanya pada bentuk kontrol dan dominasi, tetapi juga pada praktik resistensi dan agensi perempuan yang mencoba mendefinisikan tubuh mereka sendiri, di tengah benturan nilai tradisional dan modernitas yang terus berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Politik Tubuh Perempuan dalam Perspektif Kultural

Tubuh perempuan dalam masyarakat Bali tidak hanya dipahami sebagai entitas biologis, tetapi sebagai konstruksi budaya yang dipenuhi simbolisme, norma moral, dan relasi kuasa. Dalam kajian budaya dan gender, tubuh menjadi arena di mana kekuasaan bekerja melalui mekanisme sosial, adat, dan agama. Foucault dalam konsep *biopower* dan *disciplinary power* menjelaskan bahwa kekuasaan modern mengontrol tubuh melalui normalisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh institusi-institusi sosial (Nensilianti et al., 2025; Sabri, 2023). Dalam konteks Bali, institusi seperti keluarga, komunitas adat, dan lembaga keagamaan memiliki peran dominan dalam menentukan bagaimana tubuh perempuan tampil dan berperilaku.

Komodifikasi Tubuh dalam Pariwisata Budaya

Mulyana (2022) mencatat bagaimana tubuh perempuan Bali dikomodifikasi melalui industri pariwisata yang mengemas citra perempuan sebagai lambang kelembutan, spiritualitas, dan eksotisme. Perempuan Bali tampil dalam bentuk tarian tradisional, balutan kebaya ketat, dan estetika visual lain yang sesuai dengan selera pasar wisatawan. Dalam proses ini, tubuh perempuan menjadi objek konsumsi visual yang kehilangan kontrol atas narasi dan ekspresi personal mereka. Fenomena ini memperkuat tesis bahwa tubuh perempuan tidak hanya dikontrol oleh norma lokal, tetapi juga oleh logika kapitalisme global yang mempengaruhi representasi budaya.

Perspektif Interseksional dalam Kajian Gender

Perspektif interseksional, sebagaimana dikemukakan oleh Crenshaw dan dikembangkan dalam konteks lokal oleh Artawan (2023), menawarkan pendekatan yang memperhatikan keterkaitan

antara gender dengan faktor sosial lain seperti kelas, kasta, pendidikan, dan usia. Dalam masyarakat Bali, perempuan dari kasta atau latar sosial ekonomi yang lebih rendah cenderung mengalami eksploitasi tubuh yang lebih intensif, baik dalam pekerjaan domestik, ritual, maupun sektor pariwisata. Sebaliknya, perempuan dengan akses pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi mulai membangun ruang agensi melalui seni, komunitas, dan teknologi digital.

Agensi dan Perlawanan Simbolik Perempuan Bali

Walaupun struktur patriarki masih mendominasi, perempuan Bali menunjukkan bentuk-bentuk agensi dalam berbagai ruang. Perempuan mulai menduduki posisi ritual yang sebelumnya didominasi laki-laki, seperti menjadi pemangku atau Ida Pedanda Kania (Keniten et al., 2025). Selain itu, platform digital digunakan sebagai media untuk mengartikulasikan pengalaman tubuh dan identitas secara alternatif. Pendekatan *posthuman feminism* (Badruddin, 2024) melihat bahwa tubuh perempuan tidak lagi terbatas dalam definisi biologis atau sosial semata, tetapi juga melibatkan jaringan teknologi dan simbolik yang memungkinkan artikulasi identitas yang lebih beragam dan transformatif.

Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan bahwa politik tubuh perempuan Bali merupakan isu kompleks yang berada di persimpangan antara adat, agama, kapitalisme, dan modernitas. Tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek pengaturan, tetapi juga subjek perjuangan yang terus menegosiasikan otonomi dan identitasnya dalam ruang sosial yang dinamis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen ilmiah, jurnal terakreditasi, laporan riset, disertasi, dan buku akademik yang terbit antara tahun 2010 hingga 2025 yang relevan dengan isu politik tubuh, gender, adat, dan budaya di Bali. Fokus utama dari metode ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana konstruksi sosial dan budaya membentuk relasi kuasa atas tubuh perempuan Bali. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi tematik (*thematic content analysis*) untuk mengidentifikasi pola-pola ide, wacana dominan, serta representasi tubuh perempuan dalam berbagai konteks sosial, adat, agama, dan ekonomi. Kajian juga memperhatikan pendekatan interdisipliner yang mencakup teori *biopower* (Foucault, 1978; Nensilanti et al., 2025), *gender performativity* (Butler, 1990; Wardhani, 2025), dan *posthuman feminism* (Braidotti, 2022; Badruddin, 2024), yang diterapkan sebagai pisau analisis untuk membaca praktik simbolik, politis, dan kultural atas tubuh perempuan Bali. Peneliti juga mempertimbangkan perspektif interseksional (Crenshaw, 1989; Artawan, 2023) dalam menganalisis bagaimana kelas sosial, kasta, pendidikan, dan peran komunitas membentuk pengalaman perempuan atas tubuh mereka.

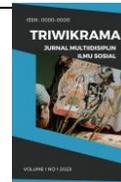
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tubuh Perempuan sebagai Simbol Budaya

Tubuh perempuan Bali memegang posisi sentral dalam konstruksi budaya dan spiritual masyarakat adat, menjadikannya lebih dari sekadar entitas biologis. Ia berfungsi sebagai simbol yang merepresentasikan kesucian, kesuburan, kehormatan, dan keseimbangan kosmis dalam tatanan sosial (Kusuma, I. M, 2024). Pandangan ini termanifestasi dalam berbagai praktik budaya, terutama melalui ritual-ritual penting seperti *menek kelih* (menstruasi pertama) dan *metatah* (potong gigi), yang mengandung makna simbolik yang dalam. Ritual *menek kelih* menandai transformasi seorang gadis menjadi perempuan dewasa secara sosial dan spiritual. Ia tidak hanya menunjukkan kematangan fisik, tetapi juga menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa tubuh perempuan kini “dimiliki” oleh sistem adat dan komunitasnya. Sementara itu *metatah* yang dilakukan menjelang dewasa atau sebelum pernikahan dianggap

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



sebagai proses penyucian diri, simbolik dari penjinakan sifat-sifat manusiawi yang dianggap buruk seperti nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Melalui ritual ini, tubuh perempuan disiapkan untuk menjalankan peran adat sebagai istri, ibu, dan penjaga harmoni keluarga serta komunitas.

Namun di balik penghormatan simbolik tersebut, terdapat struktur sosial yang membatasi kebebasan perempuan atas tubuh dan kehidupan mereka. Swastini, N (2025) Tubuh perempuan, yang disebut sebagai suci dan mulia, justru menjadi objek yang paling ketat diatur oleh norma adat. Ekspresi tubuh, pilihan berpakaian, perilaku seksual, hingga keputusan reproduktif kerap kali tidak menjadi hak otonom perempuan, melainkan dikendalikan oleh keluarga, komunitas, dan institusi adat. Raditya, A. (2023) Dalam perspektif Michel Foucault, hal ini mencerminkan konsep *biopower*, yakni kekuasaan yang bekerja melalui pengendalian tubuh manusia, bukan hanya oleh negara tetapi juga oleh norma sosial, institusi budaya, dan moralitas kolektif. Tubuh perempuan bukan hanya ditata secara fisik, tetapi juga secara simbolik dan ideologis, menjadikannya sebagai arena utama dalam permainan kuasa budaya.

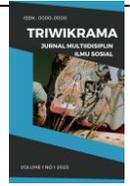
Selain itu perempuan Bali juga menghadapi kompleksitas peran yang disebut oleh Nakatani sebagai *triple burden* atau beban rangkap tiga. Pertama, mereka memiliki tanggung jawab ritual yang tinggi, terutama dalam upacara keagamaan dan adat yang berlangsung secara rutin. Perempuan sering kali menjadi motor penggerak ritual keluarga dan komunitas, mulai dari persiapan banten (*sesajen*), pengaturan ruang upacara, hingga pelaksanaan prosesi spiritual. Kedua, mereka memikul beban domestik yang besar, mencakup pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pelayanan kepada anggota keluarga lainnya, termasuk mertua dan sanak saudara. Ketiga, mereka menghadapi tekanan sosial yang kuat untuk menjaga citra diri dan keluarga, agar sesuai dengan norma-norma kesopanan, kesucian, dan kehormatan yang ditentukan oleh masyarakat adat. Muhammad, K. H. (2021) Perempuan yang menyimpang dari norma ini, seperti memilih tidak menikah, berbicara terbuka soal seksualitas, atau menolak menjalani ritual adat, sering kali distigmatisasi dan dimarginalisasi.

Meskipun perempuan Bali telah menunjukkan agen yang kuat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pariwisata, kekuatan ini masih terkungkung dalam kerangka simbolik adat yang membatasi ekspresi kebebasan sejati atas tubuh mereka. Keterlibatan perempuan dalam ritual bukan selalu bentuk penguatan, tetapi sering kali menjadi kewajiban sosial yang tidak bisa ditolak. Tubuh mereka terus menjadi arena tarik-menarik antara penghormatan simbolik dan pengekangan struktural. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bagaimana nilai-nilai budaya yang dianggap luhur juga dapat berfungsi sebagai mekanisme dominasi yang menormalisasi ketimpangan gender.

Dengan demikian tubuh perempuan dalam budaya Bali adalah medan kompleks antara penghormatan dan pengendalian. Mereka dijunjung tinggi dalam narasi budaya, tetapi sekaligus dikungkung oleh sistem nilai yang menjadikannya objek kepemilikan kolektif. Dalam konteks ini, tubuh perempuan tidak sepenuhnya dimiliki oleh dirinya sendiri, tetapi terus dinegosiasikan melalui mekanisme budaya, spiritual, dan sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk membangun keadilan gender yang lebih sejati, diperlukan dekonstruksi terhadap simbolisasi budaya yang bersifat patriarkal, serta pembukaan ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan tubuh, identitas, dan peran mereka secara otonom dan kritis.

Ruang Domestik dan Publik Dualitas Peran

Perempuan Bali menjalani kehidupan yang kompleks dengan memikul peran ganda, bahkan tiga lapis, yang menuntut keterlibatan aktif mereka dalam ruang domestik, ritual, dan publik sekaligus Rosyad, R (2021). Sebagai pengelola rumah tangga, mereka bertanggung jawab atas



pekerjaan domestik sehari-hari seperti memasak, merawat anak, serta menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain, mereka juga memegang peran sentral dalam pelaksanaan ritual keagamaan yang sangat padat dalam sistem adat Bali, termasuk menyiapkan sesajen (*banten*), mengikuti upacara adat, dan mendukung kegiatan spiritual keluarga dan komunitas. Tidak berhenti di situ, perempuan Bali juga terlibat aktif dalam ruang publik melalui keikutsertaan mereka di *banjar* (organisasi masyarakat adat), kelompok arisan, organisasi wanita seperti PKK, hingga kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk usaha mikro maupun pekerjaan formal dan informal. Keterlibatan perempuan dalam semua lini ini sering kali menciptakan konflik peran yang berat, terutama ketika waktu, tenaga, dan perhatian harus dibagi secara tidak seimbang. Lessy, Z (2020) menyebut kondisi ini sebagai *triple burden* beban tiga lapis yang terdiri dari tanggung jawab domestik, kewajiban ritual, dan aktivitas publik yang dijalani tanpa adanya pengakuan struktural yang memadai atas kontribusi dan tekanan psikologis yang mereka hadapi.

Di tengah beban sosial tersebut, masuknya sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi Bali menambah lapisan eksploitatif yang menysar tubuh perempuan sebagai objek visual dan kultural. Dalam analisis Mulyana (2022), perempuan Bali sering dijadikan simbol budaya eksotis untuk konsumsi wisatawan, dengan menekankan estetika visual seperti penampilan anggun dalam tarian tradisional, balutan kebaya ketat, dan senyuman yang selalu ramah. Tubuh perempuan tidak hanya dilihat sebagai pelaku budaya, tetapi juga dikomodifikasi menjadi bagian dari “paket wisata” yang menjual keunikan Bali. Dalam praktik ini, tubuh perempuan harus tampil sesuai standar estetika tertentu yang diciptakan oleh industri pariwisata, tanpa mempertimbangkan agensi personal atau kebebasan mereka untuk menampilkan diri sesuai kenyamanan dan identitas mereka sendiri. Eksotisme yang dilekatkan pada tubuh perempuan Bali menjadi bentuk objektifikasi yang berlapis mereka dipuja sebagai ikon budaya, tetapi sekaligus diperlakukan sebagai komoditas yang tunduk pada logika pasar dan selera konsumen. Realitas ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan ekonomi tidak semata-mata menghapus subordinasi mereka, melainkan menempatkan mereka pada posisi rentan terhadap eksploitasi simbolik dan kultural yang dilegitimasi oleh sistem sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman terhadap peran perempuan Bali harus dilihat dalam konteks ketegangan antara pengabdian adat, keterlibatan publik, dan tekanan pasar global yang seringkali mengabaikan dimensi otonomi tubuh dan identitas perempuan itu sendiri.

Relasi Kuasa dalam Praktik Adat dan Agama

Relasi kuasa dalam praktik adat dan agama di Bali memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan diatur secara simbolik dan sosial melalui konstruksi kesucian dan tabu spiritual yang telah mengakar kuat dalam sistem kepercayaan masyarakat. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah larangan bagi perempuan yang sedang menstruasi untuk memasuki pura atau mengikuti upacara keagamaan. Larangan ini tidak sekadar merupakan aturan keagamaan, tetapi mencerminkan sistem nilai yang menempatkan tubuh perempuan dalam posisi subordinat terhadap otoritas adat dan spiritual. Menstruasi dalam konteks ini dianggap sebagai kondisi *cuntaka* suatu keadaan tidak suci yang dianggap dapat mencemari kesakralan tempat ibadah atau merusak harmoni ritus keagamaan. Pandangan ini sangat mendalam dalam kosmologi Hindu Bali, di mana keseimbangan antara unsur *suci* dan *kotor* menjadi dasar bagi tatanan kehidupan ritual dan sosial.

Namun seperti yang dicatat oleh Basit, L (2022), pemaknaan ini tidak dapat dilepaskan dari warisan wacana patriarkal yang meresap ke dalam agama dan budaya. Meskipun menstruasi adalah proses biologis yang alami dan universal, ia direduksi menjadi simbol ketidaksucian yang



hanya dilekatkan pada tubuh perempuan, sementara tubuh laki-laki tidak mengalami pembatasan serupa dalam praktik keagamaan. Kajian Setiabudi, M (2025) menunjukkan bahwa pembatasan terhadap perempuan menstruasi memperkuat hierarki gender dalam ranah spiritual. Dalam hal ini, laki-laki diberikan akses penuh dan peran sentral dalam pelaksanaan ritual keagamaan, sementara perempuan dibatasi dan diposisikan sebagai potensi ancaman terhadap kemurnian spiritual, terutama dalam masa menstruasi yang tidak dapat mereka kendalikan secara sadar.

Praktik pembatasan ini mencerminkan bagaimana adat dan agama dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang secara sistematis membatasi ruang gerak dan agensi perempuan. Tubuh perempuan dijadikan objek regulasi yang tunduk pada norma spiritual, bukan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan atas tubuh dan keberadaannya sendiri. Secara simbolis, perempuan dianggap sebagai penjaga moralitas komunitas, namun pada saat yang sama, mereka juga dicurigai sebagai sumber kekotoran spiritual yang perlu dihindari dalam ruang-ruang sakral. Ini menciptakan paradox, perempuan dihormati sebagai ibu, penjaga tradisi, dan pelaksana ritual domestik, tetapi tidak diberi hak spiritual yang setara untuk berpartisipasi dalam semua bentuk ibadah secara penuh.

Lebih jauh lagi larangan ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam masyarakat adat bukan hanya berlangsung dalam ranah sosial-ekonomi, tetapi juga dalam dimensi spiritual dan simbolik yang jauh lebih halus namun sangat efektif (Hanik, U., & Khamidah, N. 2022). Perempuan tidak hanya dikekang melalui hukum atau norma sosial formal, tetapi juga melalui keyakinan religius yang tertanam dalam kesadaran kolektif dan diwariskan lintas generasi. Karena norma ini dibingkai dalam kerangka kesucian, maka ia jarang dipertanyakan dan cenderung diterima sebagai kebenaran mutlak yang tak tergoyahkan, bahkan oleh sebagian perempuan itu sendiri.

Dengan demikian larangan perempuan menstruasi memasuki pura tidak dapat dilihat sekadar sebagai aturan keagamaan, melainkan sebagai cerminan dari sistem kuasa yang mengatur siapa yang dianggap suci dan siapa yang dikategorikan sebagai pengganggu kesucian. Untuk menciptakan keadilan gender dalam praktik keagamaan dan adat, dibutuhkan pembacaan ulang terhadap simbol-simbol spiritual yang selama ini digunakan untuk melegitimasi subordinasi perempuan. Ini termasuk mendekonstruksi konsep kesucian yang bias gender dan membuka ruang dialog antara nilai tradisional dengan prinsip kesetaraan yang menghargai otonomi tubuh dan spiritualitas perempuan sebagai bagian utuh dari komunitas religius.

Perlawanan dan Agensi Perempuan

Di tengah struktur adat dan agama yang kerap membatasi ruang gerak serta otonomi perempuan Bali, muncul berbagai bentuk perlawanan simbolik dan konkret yang menandai artikulasi agensi perempuan dalam konteks sosial-budaya yang terus berubah. Perlawanan ini tidak selalu bersifat frontal atau eksplisit, melainkan seringkali diwujudkan melalui jalur pendidikan, seni, keagamaan, dan ruang-ruang kultural lainnya. Studi oleh Keniten et al. (2025) menunjukkan munculnya perempuan-perempuan Bali yang mengambil peran sebagai *pemangku* atau bahkan *Ida Pedanda Kania* seorang pemimpin spiritual yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. Perempuan-perempuan ini tidak hanya menjalankan peran ritual, tetapi juga menjadi figur otoritatif dalam komunitas keagamaan. Ini merupakan bentuk resistensi yang signifikan terhadap eksklusi perempuan dalam ruang spiritual yang selama ini dipandang sebagai wilayah patriarkal. Melalui kehadiran mereka, batas-batas antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan adat mulai digeser, memberi ruang pada pembacaan ulang tentang siapa yang berhak menjadi penjaga dan penafsir nilai-nilai suci.

Agensi perempuan Bali juga berkembang dalam lanskap yang lebih luas seiring dengan



kemajuan teknologi dan globalisasi. Pendekatan *posthuman feminism*, seperti yang dijelaskan oleh Braidotti (2022) dan Badruddin (2024), memberikan kerangka baru untuk memahami agensi perempuan tidak lagi hanya dalam kerangka tubuh biologis atau peran sosial tradisional, tetapi juga dalam jaringan digital dan ruang simbolik yang lintas batas. Perempuan Bali kini banyak yang menggunakan media sosial, platform digital, dan komunitas virtual untuk membangun narasi alternatif tentang identitas, tubuh, dan budaya mereka. Dalam ruang ini, mereka menolak cara pandang yang memosisikan tubuh mereka sebagai objek eksotis atau simbol moral komunitas. Sebaliknya, mereka mengklaim ruang untuk bercerita baik melalui puisi, seni visual, video dokumenter, maupun refleksi pribadi sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi dominan yang selama ini mengekang.

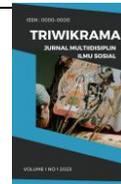
Fenomena ini juga tercermin dalam studi Hartono, D., & Sipayung, M. (2024), yang menggarisbawahi ketegangan yang terus berlangsung antara tuntutan tradisi dan arus globalisasi. Perempuan Bali saat ini hidup dalam tarik-menarik antara dua dunia, di satu sisi, mereka diharapkan menjadi penjaga warisan budaya, pelaksana ritual, dan simbol kehormatan keluarga di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada nilai-nilai modern tentang kebebasan individu, hak atas tubuh, dan ekspresi identitas personal. Di tengah tekanan ini, sebagian perempuan memilih untuk tetap menjadi bagian dari sistem adat, tetapi dengan pendekatan yang lebih reflektif dan kritis terhadap peran mereka. Mereka tidak serta-merta menolak tradisi, melainkan menafsirkannya ulang agar lebih selaras dengan nilai-nilai kesetaraan dan keberdayaan.

Contoh-contoh agensi ini menunjukkan bahwa perempuan Bali bukanlah subjek pasif dalam struktur budaya dan agama. Mereka terus menegosiasikan ruang mereka, tidak hanya sebagai penerus tradisi, tetapi juga sebagai pembaharu dan penafsir baru atas nilai-nilai yang diwariskan. Perlawanan mereka tidak selalu dalam bentuk protes terbuka, melainkan dalam bentuk-bentuk yang subtil, simbolik, dan strategis mulai dari kehadiran dalam ritual keagamaan yang dulu tertutup, hingga penciptaan karya seni dan wacana digital yang merepresentasikan tubuh perempuan sebagai milik mereka sendiri. Agensi ini bersifat transformatif karena ia tidak hanya menantang struktur patriarkal, tetapi juga memperluas definisi tentang apa artinya menjadi perempuan Bali di masa kini: perempuan yang mampu berdialog dengan masa lalu, namun tetap berdaulat atas masa depan dan tubuh mereka sendiri.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kajian ini menegaskan bahwa tubuh perempuan Bali tidak sekadar entitas biologis, melainkan arena simbolik yang dipenuhi oleh makna budaya, aturan adat, norma spiritual, dan relasi kuasa yang kompleks. Tubuh perempuan diposisikan sebagai penjaga moralitas dan kesucian, namun pada saat yang sama menjadi objek pengendalian sosial, baik dalam ruang domestik maupun publik. Praktik-praktik adat dan keagamaan, seperti larangan perempuan menstruasi masuk pura atau kewajiban mengikuti ritual adat, menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dikontrol melalui konstruksi kesucian yang sarat dengan bias patriarkal. Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam sektor publik dan pariwisata menambah lapisan eksploitatif di mana tubuh mereka dikomodifikasi dalam logika pasar budaya. Namun, di balik struktur yang membatasi tersebut, perempuan Bali juga menunjukkan bentuk-bentuk agensi dan resistensi baik melalui partisipasi dalam kepemimpinan spiritual, keterlibatan dalam komunitas, seni, maupun ruang digital. Mereka tidak hanya menjadi objek tradisi, tetapi juga aktor perubahan yang aktif menegosiasikan makna tubuh, identitas, dan peran mereka di tengah benturan nilai antara adat dan modernitas. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan gender yang substansial, perlu dilakukan pembacaan kritis terhadap konstruksi budaya dan spiritual yang membatasi



tubuh perempuan, serta pembukaan ruang-ruang baru bagi otonomi dan keberdayaan perempuan dalam masyarakat Bali kontemporer.

Saran

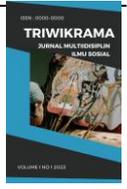
Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong transformasi sosial dan kultural terkait politik tubuh perempuan di Bali. Pertama, penting untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pendidikan adat dan keagamaan, baik melalui kurikulum sekolah maupun pelatihan komunitas, guna membongkar konstruksi sosial yang bias patriarkal dan memperkuat pemahaman bahwa perempuan bukan sekadar pelaksana tradisi, melainkan agen spiritual dan budaya yang aktif. Kedua, pemerintah daerah bersama komunitas lokal perlu menciptakan ruang aman bagi perempuan, baik secara fisik maupun digital, agar mereka dapat mengekspresikan tubuh dan identitasnya secara otonom tanpa rasa takut terhadap stigma sosial maupun sanksi adat.

Ketiga, revitalisasi terhadap praktik-praktik adat dan spiritual perlu dilakukan melalui pembacaan ulang yang emansipatoris, agar nilai-nilai kesucian dan kehormatan tidak lagi digunakan untuk menjustifikasi pengendalian atas tubuh perempuan. Upaya ini memerlukan dialog kritis antara tokoh adat, pemuka agama, dan generasi muda perempuan. Keempat, untuk memperkaya perspektif yang lebih aplikatif dan kontekstual, penelitian lanjutan sebaiknya melibatkan pendekatan partisipatoris dengan menjadikan perempuan Bali sebagai subjek aktif yang menyuarakan pengalamannya sendiri dalam berbagai konteks sosial, ritual, dan ekonomi.

Terakhir, kolaborasi lintas disiplin antara akademisi, seniman, aktivis perempuan, dan pemangku kepentingan adat perlu didorong untuk menghasilkan karya-karya kritis dan alternatif seperti seni pertunjukan, media digital, dan publikasi budaya yang mampu menantang narasi dominan tentang tubuh perempuan yang eksotis, tunduk, dan simbolik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta masyarakat Bali yang lebih inklusif dan adil gender, di mana tubuh perempuan tidak lagi menjadi objek pengendalian, tetapi menjadi simbol keberdayaan dan agensi yang berdaulat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Artawan, G. (2023). *Menembus Patriarki*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Badrudin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. (2024). *Pengantar sosiologi*. Zahir Publishing.
- Basit, L., & Kom, M. I. (2022). *Lensa Gender Di Media Massa: Meta Analisis Politisi Perempuan*. umsu press.
- Elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hanik, U., & Khamidah, N. (2022). *Ekoteologi Masyarakat Lombok Dalam Tradisi Bau Nyale*.
- Hartono, D., & Sipayung, M. (2024). Dinamika Identitas Budaya dalam Narasi Kontemporer: Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi. *MOUSE JURNAL HUMANIORA*, 1(2), 49-54



Huriani, Y. (2021). Pengetahuan fundamental tentang perempuan.

Kusuma, I. M. W., SH, M. P. H., & Subawa, I. M. P. (2024). *Ikonografi Seksual dalam Pura dan Implikasinya dalam Pendidikan*. Nilacakra.

Keniten, A., Sutrisna, W., & Yuliani, D. (2025). *Agensi Perempuan Bali dalam Ruang Spiritual: Studi atas Peran Pemangku dan Ida Pedanda Kania*. *Jurnal Gender dan Budaya*, 7(1), 45-60.

Lessy, Z., Sya'rani, A., Damayanti, P., & Masrurroh, U. (2020). Women's Lives Matter: Poor, Unemployed, Single Mothers Experiencing Psychological Burden amid Covid- 19 Outbreak in Yogyakarta City and Bantul (Kluster: Penelitian Dasar Interdisipliner Tanggap Covid-19).

Muhammad, K. H. (2021). *Islam agama ramah perempuan*. IRCiSoD.

Mulyana, A. (2022). *Gaya Hidup Metroseksual: Perspektif Komunikatif*. Bumi Aksara.

Nensilanti, N., Ridwan, R., & Ramadani, A. S. (2025). Relasi Kuasa dalam Novel Pulang Karya Leila S. Chudori Perspektif Michel Foucault. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(3), 1682-1693.

Raditya, A. (2023). *Dunia hitam: Arena reproduksi Bajing Madura*. Ardhie Raditya.

Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). Toleransi beragama dan harmonisasi sosial.

Sabri, M. (2023). *Politik Penguasaan Tubuh Perempuan dalam Implementasi Qanun Syariah Islam tentang Busana Islami di Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar- Raniry Banda Aceh).

Setiabudi, M. N., & Ardi, M. (2025). Potret Gerakan Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Yasinan di Desa Winong Perspektif Feminisme Fatimah Mernissi. *Az- Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 5(2), 108-129.

Swastini, N. L. M. E., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Politik tubuh perempuan antara kontrol sosial dan resistensi. *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(3).